



Article

Eksklusi Sosial dalam Pendidikan: Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam

Ananda Putri Aqila Al-Faiza¹, Nur Lailatul Fitri², Abyan Tsany³,
Aidah Farah Aqilah⁴

¹ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : anandaaaputri@student.ub.ac.id

² Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : nurlailaftr@student.ub.ac.id

³ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : abyandhana22@student.ub.ac.id

⁴ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : aidafaraha@student.ub.ac.id

PERADABAN JOURNAL
OF INTERDISCIPLINARY
EDUCATIONAL RESEARCH
Vol. 3, Issue 1, February 2025
ISSN 3025-2121

Page : 46-59

DOI: [https://doi.org/10.59001/
pjier.v3i1.198](https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198)

Copyright © The Author(s)
2023



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

This study analyzes social exclusion in education in Indonesia and Vietnam, evaluates existing policies, and proposes policy recommendations to enhance educational inclusion. Using a systematic literature review method, data were collected from various academic sources, reports from international organizations, and government policy documents. The analysis was conducted using a thematic approach based on the theories of Somerville, Byrne, and MacMullin. The findings indicate that social exclusion in education in both countries is influenced by economic and geographical factors, as well as ethnic and gender-based discrimination. Although Vietnam has adopted more structured inclusive policies, challenges to ensuring educational access for marginalized groups persist. In Indonesia, policy implementation continues to face obstacles regarding equitable access and effectiveness at the local level. This study recommends strengthening affirmative policies, improving educational infrastructure in remote areas, and actively involving communities in education policy formulation. These findings are expected to serve as a reference for policymakers in designing more inclusive strategies to reduce social exclusion in education.

Keyword: inclusive education, Indonesia and Vietnam, social exclusiona

Abstrak

Penelitian ini menganalisis eksklusi sosial dalam pendidikan di Indonesia dan Vietnam, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi pendidikan. Menggunakan metode studi literatur sistematis, data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, laporan organisasi internasional serta dokumen kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik berdasarkan teori Somerville, Byrne, dan MacMullin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial dalam pendidikan di kedua negara dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, serta diskriminasi berbasis etnis dan gender. Meskipun Vietnam telah mengadopsi kebijakan inklusif yang lebih terstruktur, tantangan dalam akses pendidikan bagi kelompok marjinal masih terjadi. Di Indonesia, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam pemerataan akses dan efektivitas di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, serta keterlibatan aktif komunitas dalam perumusan kebijakan pendidikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih inklusif untuk mengurangi eksklusi sosial dalam pendidikan.

Kata Kunci: eksklusi sosial, Indonesia dan Vietnam, pendidikan inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan secara umum dipahami sebagai sebuah usaha sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Darmaningtyas, 2004). Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam hitungan skala yang lebih luas (Azra, 1999). Pendidikan diartikan sebagai pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini, peserta didik diharapkan akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoritik dalam menjalani kehidupannya yang selalu berubah dalam kompleksitas modern (Mul Khan, 1993). Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong mobilitas sosial.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak merata, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Kondisi ini menciptakan eksklusi sosial, di mana individu atau kelompok tertentu terhalang dari kesempatan yang setara dalam pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Eksklusi sosial dalam ranah pendidikan termanifestasi ketika kelompok-kelompok tertentu mengalami hambatan aksesibilitas pendidikan akibat faktor-faktor struktural, sosial, dan ekonomi. Fenomena ini memperoleh signifikansi yang semakin besar dalam konteks global, di mana disparitas pendidikan berpotensi memperparah ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Perspektif para ahli memperkaya pemahaman tentang eksklusi sosial. Somerville (1998) menekankan dimensi struktural, menyoroti akses tidak setara

terhadap sumber daya pendidikan. Byrne (1999) fokus pada identitas sosial, menyatakan bahwa eksklusi terjadi ketika individu atau kelompok terpinggirkan karena identitas mereka, seperti ras, gender, atau status ekonomi, yang membatasi akses terhadap kesempatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. McMullin (2004) mendefinisikan eksklusi sosial dalam konteks “kapasitas untuk berpartisipasi,” menekankan bahwa eksklusi tidak hanya disebabkan oleh diskriminasi langsung, tetapi juga oleh kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk partisipasi penuh dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan demikian, eksklusi sosial dalam pendidikan adalah masalah multidimensional yang melibatkan faktor struktural, identitas sosial, dan ketersediaan sumber daya. Mengatasi eksklusi sosial memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi hambatan sistemik dan individual, serta memastikan akses yang adil dan setara terhadap pendidikan bagi semua kelompok masyarakat.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam, eksklusi sosial dalam pendidikan menjadi tantangan besar. Indonesia, dengan keragaman budaya dan etnis yang luas, menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan inklusif. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), ketimpangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan memperparah eksklusi. Letak geografis yang terpencil dan kekurangan guru berkualitas di daerah-daerah tersebut turut memperburuk situasi.

Di Vietnam, meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi, kelompok etnis minoritas seperti Hmong dan Khmer masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas (World Bank, 2018). Penelitian oleh Taylor dan Khanh (2017) menunjukkan bahwa kebijakan yang kurang mendukung inklusi sosial bagi kelompok minoritas etnis menjadi faktor utama. Meskipun tingkat melek huruf tinggi, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara mayoritas Kinh dan minoritas tetap signifikan. Anak-anak dari kelompok minoritas sering mengalami diskriminasi (UNICEF, 2021). Program “Education for All” (Nguyen & Tran, 2019) bertujuan untuk meningkatkan akses, namun tantangan bahasa, budaya, dan geografis masih menjadi hambatan (UNESCO, 2020). Laporan Human Rights Watch (2020) menyoroti keterbatasan implementasi kebijakan inklusi bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam eksklusi sosial dalam pendidikan di Indonesia dan Vietnam. Kajian ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab, dampak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi eksklusi, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pendidikan inklusif yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan strategi utama berupa studi literatur, yang memungkinkan eksplorasi mendalam dan holistik terhadap fenomena eksklusi sosial dalam pendidikan, bukan pengukuran kuantitatif variabel (Sugiyono, 2013). Studi literatur, sebagai metode pengumpulan dan analisis data sekunder, memungkinkan peneliti untuk mensintesis informasi dari berbagai sumber kredibel seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan (Creswell & Creswell, 2017). Kerangka analisis penelitian ini didasarkan

pada teori-teori yang dikembangkan oleh Somerville, Byrne, dan MacMullin. Teori Somerville menekankan faktor ekonomi dan struktural, Byrne fokus pada peran kebijakan dan struktur sosial, sementara MacMullin menyoroti dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Integrasi ketiga teori ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang eksklusi sosial di Indonesia dan Vietnam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis, meliputi pencarian literatur di database akademik dan perpustakaan digital (Google Scholar, JSTOR, SpringerLink, ProQuest), serta situs web resmi pemerintah dan laporan organisasi internasional (UNESCO, UNICEF, World Bank). Seleksi sumber didasarkan pada relevansi, kredibilitas, keterkinian, dan komprehensif. Data dikelompokkan berdasarkan tema utama, dianalisis secara mendalam, dan disintesis menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Validitas dan reliabilitas penelitian dipastikan melalui triangulasi sumber, pengecekan konsistensi, evaluasi kritis terhadap sumber, dan analisis mendalam terhadap data. Langkah-langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian akurat, terpercaya, dan mencerminkan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Indonesia dan Vietnam

Selain dari faktor ekonomi yang ada di suatu negara, terdapat sistem pendidikan yang berbeda pada setiap negara untuk menunjang pendidikan di negaranya. Di Indonesia sendiri, kurikulum pendidikan sering mengalami perubahan yaitu pada 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terbaru adalah kurikulum 2013. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang umum terjadi ketika adanya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat (Alhamuddin, 2014). Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan utama yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang juga ditetapkan oleh pemerintah pendidikan wajib selama 12 tahun. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi. Salah satu perubahannya adalah adanya peralihan kurikulum berbasis kompetensi dan penerapan metode pembelajaran aktif. Namun, meskipun begitu masih terdapat banyak tantangan pada implementasi lapangannya. Banyak sekolah yang menghadapi kekurangan guru yang berkualitas juga kurangnya fasilitas yang memadai. Pada pendidikan tinggi di Indonesia memiliki persentase yang rendah, hanya sekitar 9% penduduk berusia diatas 25 tahun yang memiliki gelar sarjana.

Adapun adanya anggaran pendidikan pada setiap negara. Di Indonesia sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Hal tersebut telah diatur oleh UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran Pendidikan di Indonesia tidak hanya dialokasikan untuk sekolah negeri, tetapi juga dana untuk institusi pendidikan swasta. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gaji guru dan tenaga pendidik, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, beasiswa dan program bantuan pendidikan.

Namun, dalam pengelolaan anggaran masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama ketidakmerataan penggunaan anggaran, sebagian besar

anggaran pendidikan seringkali terfokus pada wilayah perkotaan, sehingga daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih mengalami sumber daya pendidikan yang memadai. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dalam beberapa kasus dana tidak digunakan secara optimal atau bahkan disalahgunakan untuk mengurangi dampak positif dari alokasi anggaran yang besar. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan antara pendanaan dan hasil pendidikan. Anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat namun hasil pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Meskipun persentase alokasi anggaran pendidikan pada PDB Indonesia mencapai sekitar 3,6%, hal tersebut masih tergolong di bawah standar yang direkomendasikan oleh UNESCO untuk negara-negara berkembang yaitu 6% dari PDB. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam.

Sedangkan sistem pendidikan di Vietnam mengikuti sistem 5-4-3, yaitu lima tahun pendidikan dasar, empat tahun pendidikan menengah pertama, dan tiga tahun pendidikan menengah atas. mengalami perkembangan pesat dengan beberapa perubahan signifikan sejak reformasi ekonomi "Doi Moi" pada 1980-an. Pendidikan di Vietnam saat ini mengalami perkembangan pesat dengan beberapa perubahan signifikan sejak reformasi ekonomi "Doi Moi" pada 1980-an. Kebijakan tersebut membuka pintu bagi partisipasi sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan memperkenalkan sistem universitas semi-publik dan non-publik. Sebagai bagian dari reformasi, Vietnam telah mendirikan beberapa Universitas Multidisipliner nasional dan regional. Universitas tersebut menawarkan berbagai program di berbagai disiplin ilmu untuk mempersiapkan lulusannya menghadapi tantangan ekonomi pasar.

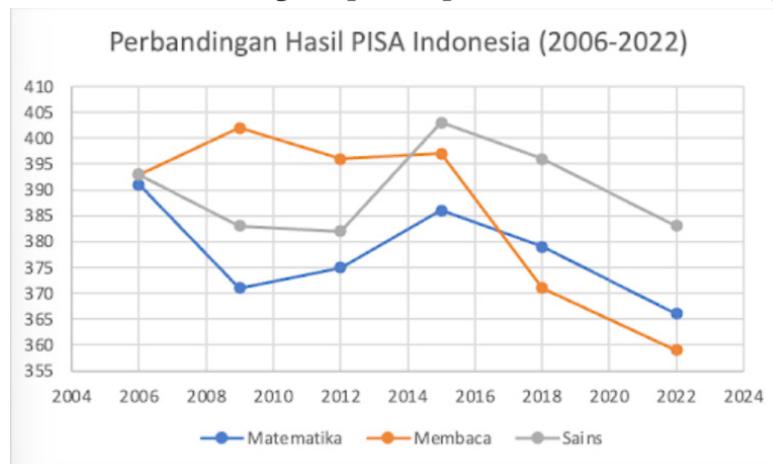
Anggaran pendidikan di Vietnam, beberapa tahun terakhir terus meningkat karena pemerintah Vietnam mengakui pentingnya pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan belanja pendidikan menjadi 15% dari anggaran nasional pada tahun 2000. Selain dana pemerintah, biaya pendidikan di Vietnam sebagian besar ditanggung oleh rumah tangga. Pada 1995, rumah tangga menyumbang sekitar 43% dari total pengeluaran pendidikan. Kontribusi rumah tangga ini lebih tinggi untuk pendidikan dasar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi, biaya ditanggung lebih banyak oleh pemerintah. Sebagai bagian dari reformasi "Doi Moi", Pemerintah Vietnam memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan pendirian institusi semi-publik dan institusi yang dikelola masyarakat (*people-founded*) untuk memperluas akses ke pendidikan. Institusi tersebut memperoleh sebagian besar dana operasionalnya dari biaya yang dibayarkan oleh siswa. Belanja pendidikan di Vietnam juga tidak hanya fokus pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mencakup pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi. Meskipun Vietnam telah berhasil meningkatkan anggaran pendidikan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti ketidakmerataan akses pendidikan dan kurangnya transparansi dan pengawasan.

Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Vietnam

Dalam mengevaluasi pendidikan di suatu negara, terdapat berbagai parameter yang digunakan oleh lembaga internasional. Salah satunya adalah *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang merupakan asesmen

yang dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Partisipasi asesmen tersebut berusia 15 tahun dari berbagai negara di seluruh dunia dan partisipasi tersebut memberikan gambaran yang berharga mengenai kualitas pendidikan suatu negara. Data yang dihasilkan mengenai pemahaman prestasi akademik siswa, mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan, dan faktor yang mempengaruhi hasil pendidikan. (HIMIESPA.FEB, 2024)

Pada Indonesia, rata-rata hasil PISA menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan stagnan dalam waktu 2 dekade terakhir. Analisis data menunjukkan pada 2022, rata-rata skor PISA Indonesia mengalami penurunan yang mencolok di semua aspek yang diukur dan bahkan Indonesia memiliki hasil PISA dibawah rata-rata seluruh negara yang berpartisipasi di dalam PISA (OECD, 2018). Dan berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki tingkat partisipasi sekolah usia dini yang rendah.



Sedangkan pada Vietnam memiliki pencapaian yang lebih baik daripada siswa di negara-negara OECD secara rata-rata dalam PISA. Nilai-nilai yang masyarakat tempatkan pada pendidikan telah diwujudkan dalam tindakan konkret. Kementerian Pendidikan dan Pelatihan (MOET) mengembangkan dan memantau standar minimum untuk segala fasilitas pendidikan di Vietnam dan program tersebut digunakan untuk membuat indeks input yang tidak hanya digunakan untuk memantau kemajuan (Le et al, 2022). Selain itu, Vietnam memberikan penghargaan pada pembelajaran dan guru dan menarik guru-guru berkualitas yang menjadi salah satu faktor pendukung pendidikan Vietnam lebih unggul daripada Indonesia.

Eksklusi Sosial: Tinjauan Teoretis dari Perspektif Somerville, Byrne, dan MacMullin

Konsep Eksklusi Sosial

Somerville (1998) mengidentifikasi dua bentuk utama eksklusi sosial: pertama, pengangguran jangka panjang yang menyebabkan keterputusan individu dari pasar kerja, dan kedua, penolakan terhadap hak-hak kewarganegaraan. Dalam konteks pendidikan, eksklusi sosial dapat disamakan dengan pengangguran jangka panjang, di mana kelompok tertentu kehilangan akses terhadap pendidikan yang berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial (Craig, 2000). Di Indonesia dan Vietnam, faktor ekonomi sering menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Anak-anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan, misalnya, cenderung putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau tidak mampu membiayai pendidikan mereka.

Selain aspek ekonomi, Somerville juga menyoroti pentingnya hak-hak kewarganegaraan dalam fenomena eksklusi sosial. Ketika individu tidak memperoleh hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, mereka secara efektif dikeluarkan dari masyarakat yang lebih luas. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, di Vietnam, meskipun tingkat literasi nasional tergolong tinggi, anak-anak dari kelompok etnis minoritas kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Situasi ini menunjukkan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Berbeda dengan Somerville, Byrne (2005) menekankan bahwa eksklusi sosial merupakan proses dinamis yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu "terkunci" dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Byrne melihat eksklusi sosial sebagai akibat dari penolakan atau tidak terpenuhinya hak-hak sipil, politik, dan sosial sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Dalam ranah pendidikan, konsep eksklusi sosial yang dikemukakan oleh Byrne tercermin dalam kondisi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil di Indonesia dan Vietnam. Mereka sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, baik karena minimnya infrastruktur sekolah, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, maupun keterbatasan teknologi pembelajaran. Eksklusi ini tidak hanya terbatas pada akses terhadap pendidikan itu sendiri, tetapi juga mencakup keterbatasan mereka dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan yang berdampak pada pendidikan mereka.

Sementara itu, McMullin memperluas konsep eksklusi sosial dengan menekankan bahwa eksklusi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan, tetapi juga oleh diskriminasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung (Craig, 2000). Dalam konteks pendidikan di Indonesia dan Vietnam, diskriminasi berbasis etnis, gender, atau status sosial semakin memperdalam jurang eksklusi sosial. Sebagai contoh, di beberapa wilayah terpencil di Indonesia, anak perempuan memiliki peluang pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, terutama di komunitas dengan norma gender yang masih konservatif.

Selain itu, McMullin menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan bentuk eksklusi sosial yang paling mendasar. Meskipun Vietnam telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas akses pendidikan dasar, anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok etnis minoritas masih menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Keterbatasan ini berdampak langsung pada peluang mereka untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan guna bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya semakin memperkuat lingkaran eksklusi sosial.

Dimensi Eksklusi Sosial

Somerville (1998) menyoroti bagaimana struktur komodifikasi dalam sektor perumahan dapat menciptakan eksklusi sosial, yang pada dasarnya membatasi akses kelompok tertentu terhadap sumber daya penting. Dalam konteks pendidikan,

konsep ini dapat diterapkan pada ketimpangan akses terhadap fasilitas pendidikan. Di Indonesia dan Vietnam, terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya fasilitas teknologi, bahan ajar, dan tenaga pengajar berkualitas. Selain itu, komodifikasi pendidikan melalui sistem sekolah swasta di perkotaan semakin memperdalam eksklusi sosial, karena keluarga miskin di pedesaan atau kelompok minoritas tidak mampu membayar biaya pendidikan yang lebih tinggi.

Selain aspek struktural, Somerville juga menggarisbawahi konsep *human flourishing* atau pengembangan potensi manusia sebagai dimensi penting dalam eksklusi sosial. Dalam dunia pendidikan, siswa yang tidak mendapatkan akses ke lingkungan belajar yang mendukung – termasuk keberadaan guru yang kompeten, sumber daya pembelajaran yang memadai, serta suasana belajar yang kondusif – akan mengalami hambatan dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Fenomena ini relevan baik di Indonesia maupun Vietnam, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali bergantung pada faktor geografis dan status sosial ekonomi keluarga.

Sementara itu, Byrne (2005) memahami eksklusi sosial sebagai proses multidimensional yang mencakup pemutusan akses terhadap hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Byrne menekankan bahwa hak kewarganegaraan sering kali tidak sepenuhnya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks pendidikan di Indonesia dan Vietnam, anak-anak dari latar belakang etnis minoritas atau ekonomi rendah tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga terputus dari proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka (Walsh & Urbaniak, 2023).

Lebih lanjut, Byrne juga mengangkat isu eksklusi politik dalam pendidikan. Ketika kebijakan pendidikan dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok marjinal, mereka semakin termarginalisasi dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, anak-anak dari suku minoritas di Vietnam sering kali tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan konteks budaya mereka, sehingga memperdalam eksklusi sosial dan budaya yang mereka alami. Demikian pula, di Indonesia, kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan komunitas adat atau kelompok dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan.

McMullin (2004) memperluas perspektif eksklusi sosial dengan menekankan bahwa eksklusi terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya esensial yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Dalam ranah pendidikan, eksklusi ini sering kali tercermin dalam bentuk diskriminasi sistemik, baik berdasarkan status ekonomi maupun asal-usul etnis. Sebagai contoh, di Indonesia, anak-anak dari keluarga miskin kerap mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat keterbatasan finansial. Sementara itu, di Vietnam, kelompok etnis minoritas seperti suku Hmong masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara (Walsh & Urbaniak, 2023).

McMullin juga mengidentifikasi rendahnya tingkat pendidikan sebagai bentuk eksklusi sosial yang paling fundamental. Dalam hal ini, baik di Indonesia maupun Vietnam, akses terhadap pendidikan berkualitas masih lebih banyak dinikmati oleh

kelompok elit, sementara kelompok marjinal menghadapi tantangan struktural yang menghambat mereka untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketimpangan dalam sistem pendidikan ini tidak hanya memperkuat eksklusi sosial, tetapi juga berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan (Somerville, 2013).

Mekanisme Eksklusi

Byrne memahami eksklusi sosial sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks pendidikan, eksklusi ini tercermin dalam keterbatasan akses terhadap sekolah berkualitas, beasiswa, serta kesempatan belajar yang relevan. Byrne mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap eksklusi sosial dalam pendidikan, yaitu:

1. Kemiskinan dan Pendapatan Rendah

Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ketidakmampuan membayar biaya sekolah, buku, atau seragam sering kali menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah lebih awal dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga mampu. Di Indonesia dan Vietnam, kesenjangan ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap sekolah berkualitas di daerah pedesaan atau terpencil, yang membatasi kesempatan mereka untuk bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif (Rosser, 2018).

2. Akses Terbatas ke Pasar Kerja

Kesenjangan dalam akses pendidikan juga berdampak langsung pada ketidaksetaraan dalam dunia kerja. Anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok minoritas etnis sering kali tidak terwakili di sekolah-sekolah elit, yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan pendapatan yang lebih baik di masa depan (Rosser, 2018).

3. Dampak Lingkungan dan Infrastruktur

Selain faktor ekonomi, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pendidikan turut memperparah eksklusi sosial. Di wilayah terpencil di Indonesia dan Vietnam, keterbatasan fasilitas sekolah, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, serta jarak yang jauh menjadi hambatan signifikan bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan yang layak (Rosser, 2018).

Selain faktor-faktor tersebut, Byrne juga menekankan bahwa eksklusi sosial bersifat multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pekerjaan, eksklusi sosial juga mencakup keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem pendidikan, orang tua dan siswa dari kelompok terpinggirkan sering kali memiliki pengaruh yang sangat terbatas terhadap kebijakan pendidikan, sehingga kebutuhan mereka kurang terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional.

Sejalan dengan Byrne, Somerville melihat eksklusi sosial sebagai proses yang menghambat individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam ranah pendidikan, eksklusi ini tampak dari berbagai hambatan yang dihadapi kelompok marginal, termasuk minoritas etnis dan perempuan. Somerville mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memperkuat

eksklusi sosial dalam pendidikan:

1. **Diskriminasi Sistemik**

Di Indonesia dan Vietnam, diskriminasi terhadap kelompok minoritas etnis seperti suku Hmong di Vietnam atau komunitas adat di Indonesia menjadi faktor signifikan dalam eksklusi sosial. Anak-anak dari kelompok ini sering kali menghadapi hambatan bahasa, kurangnya dukungan sumber daya, serta ketidakadilan dalam distribusi fasilitas pendidikan (Somerville, 2013).

2. **Ketidakadilan Gender**

Di beberapa wilayah, anak perempuan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Hambatan ini terutama terjadi di daerah pedesaan atau komunitas tradisional yang masih menganggap pendidikan bagi anak perempuan kurang penting dibandingkan pendidikan bagi anak laki-laki (Somerville, 2013).

Eksklusi sosial dalam pendidikan juga diperkuat oleh relasi kekuasaan, di mana kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkualitas mendominasi sumber daya dan kesempatan. Akibatnya, kelompok marginal semakin sulit untuk mengakses sekolah berkualitas atau universitas terkemuka, yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi.

McMullin menambahkan dimensi lain dalam analisis eksklusi sosial, yaitu peran stigma sosial. Dalam dunia pendidikan, stigma terhadap kelompok tertentu – seperti siswa dari latar belakang ekonomi rendah, minoritas etnis, atau siswa dengan kebutuhan khusus – dapat memperburuk eksklusi. Stigma ini tidak hanya berdampak pada isolasi sosial, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri siswa serta memengaruhi performa akademik mereka (Rosser, 2018). Di Indonesia dan Vietnam, anak-anak dari keluarga miskin atau daerah pedesaan sering kali dianggap kurang berpotensi untuk sukses di tingkat pendidikan tinggi, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi semakin terbatas.

Dengan demikian, mekanisme eksklusi sosial dalam pendidikan tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi struktural, politik, budaya, serta psikososial. Upaya mengatasi eksklusi sosial dalam pendidikan memerlukan kebijakan yang lebih inklusif, termasuk perbaikan akses infrastruktur, peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan, serta penghapusan stigma terhadap kelompok marginal.

Arah Kebijakan Pendidikan Inklusif: Rekomendasi untuk Indonesia dan Vietnam

Eksklusi sosial dalam pendidikan adalah masalah signifikan yang membatasi akses anak-anak dari kelompok marginal ke pendidikan yang berkualitas. Perbandingan antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tantangan yang serupa, implementasi kebijakan mereka dalam menangani eksklusi sosial berbeda.

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, eksklusi sosial seringkali terkait dengan faktor ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, dan

meskipun ada kebijakan seperti program afirmatif untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal, implementasinya masih belum merata (Linh & Azar 2019). Diskriminasi berbasis etnis dan gender juga menjadi faktor penghambat akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi anak-anak perempuan dan kelompok minoritas.

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, termasuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan sekolah inklusif sebanyak 550 untuk melayani 5.000 siswa dengan kebutuhan khusus (Syahra, 2010). Akan tetapi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, sikap diskriminatif, serta infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang tidak memadai (Maulana, 2023). Seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bertujuan mengurangi beban biaya sekolah bagi keluarga berpenghasilan rendah, tetapi distribusi dana yang tidak merata dan penggunaan yang tidak tepat masih menjadi masalah. Selain itu, meskipun ada kebijakan pendidikan inklusif, penolakan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sering kali muncul, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat. Kurangnya pelatihan guru untuk menangani siswa dengan kebutuhan khusus juga memperparah situasi ini.

Tidak hanya itu, program lain yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal, tetapi pelaksanaannya sering kali diwarnai oleh masalah teknis dan administrasi, seperti pendataan yang kurang akurat (Tanjung, et al., 2023). Pun terdapat kemajuan dalam hal kebijakan, implementasi yang efektif masih memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

Kebijakan pendidikan di Vietnam

Implementasi kebijakan inklusi sosial di sektor pendidikan di Vietnam telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah Vietnam, melalui berbagai kebijakan nasional dan komitmen internasional, berusaha memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Salah satu tonggak penting dalam kebijakan inklusif di Vietnam adalah rencana pendidikan inklusif nasional "Inclusive Education until 2020." Program ini menargetkan beberapa capaian kunci, seperti memastikan 70% anak-anak penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan berkualitas dan inklusif pada tahun 2020. Pada kenyataannya, pencapaian ini menjadi salah satu indikator penting bahwa Vietnam serius dalam mengatasi eksklusi sosial di bidang pendidikan (Linh & Azar, 2019).. Selain itu, 50% dari pengelola, guru, dan staf pendukung di sekolah-sekolah dilatih khusus untuk menangani pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan upaya negara dalam membekali tenaga pendidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Walsh & Urbaniak, 2023).

Pemerintah juga mendirikan pusat-pusat dukungan pendidikan inklusif di berbagai provinsi. Pada tahun 2020, setidaknya 40% provinsi dan kota besar di Vietnam sudah memiliki pusat ini, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada

sekolah-sekolah dalam mendukung anak-anak dengan disabilitas. Selain itu, 100% dari semua provinsi dan kota di Vietnam diwajibkan untuk mengimplementasikan dokumen hukum yang mendukung aksesibilitas pendidikan bagi kelompok rentan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat di tingkat nasional juga diterapkan di tingkat daerah (Linh & Azar, 2019)..

Pemerintah Vietnam telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB (UNCRPD) pada tahun 2007 dan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1990. Keterlibatan dalam perjanjian ini tidak hanya memperkuat posisi Vietnam di kancah internasional, tetapi juga mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih kuat di tingkat nasional untuk mendukung pendidikan inklusif (Linh & Azar, 2019). Hal ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa negara memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Dalam hal tingkat pendidikan dasar, Vietnam telah mencapai target yang mengesankan. Pada tahun 2020, sekitar 99% anak-anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah, sementara 95% anak usia sekolah menengah pertama juga berpartisipasi dalam pendidikan formal. Selain itu, 80% remaja telah mencapai tingkat pendidikan setara sekolah menengah atas atau lebih tinggi (Linh & Azar, 2019). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Vietnam dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif yang komprehensif, di mana tidak hanya anak-anak penyandang disabilitas tetapi juga kelompok rentan lainnya mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.

Vietnam juga menargetkan agar 70% anak-anak dengan disabilitas dapat mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang, dari sekolah dasar hingga menengah. Meski angka tersebut belum mencapai 100%, pencapaian ini menandakan bahwa Vietnam telah membuat langkah maju yang signifikan dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam hal pendidikan inklusif .

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji eksklusi sosial dalam pendidikan di Indonesia dan Vietnam dengan menggunakan teori Somerville, Byrne, dan MacMullin sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menghadapi tantangan serupa, seperti ketimpangan ekonomi, geografis, dan diskriminasi terhadap kelompok marginal, pendekatan kebijakan mereka berbeda dalam menangani masalah ini. Di Indonesia, eksklusi sosial dalam pendidikan terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geografis, dengan keterbatasan akses bagi anak-anak di daerah pedesaan serta kelompok etnis minoritas dan perempuan. Kebijakan afirmatif telah diterapkan, tetapi implementasinya masih belum merata. Sementara itu, Vietnam menunjukkan kemajuan lebih signifikan melalui kebijakan pendidikan inklusif yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan guru dan dukungan bagi kelompok rentan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau komunitas etnis minoritas di daerah terpencil. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif dalam mengatasi eksklusi sosial. Indonesia dapat belajar dari pendekatan Vietnam dengan memperkuat pelatihan tenaga pendidik, memperluas infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, serta memastikan kebijakan afirmatif diterapkan secara merata. Selain itu, partisipasi kelompok marginal dalam pengambilan kebijakan perlu ditingkatkan agar kebijakan

lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena mengandalkan studi literatur. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, seperti wawancara dan survei lapangan, disarankan untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang dinamika eksklusi sosial dalam pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa eksklusi sosial dalam pendidikan adalah isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Keberhasilan Vietnam dalam merancang kebijakan inklusif dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem pendidikannya. Dengan strategi yang tepat, sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif dapat diwujudkan di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2).
- Byrne, D. (2005). *Social exclusion* (Issue 1). Open University Press.
- CRAIG, G. (2000). Review of *Social Exclusion*, by D. Byrne. *Work, Employment & Society*, 14(3), 592–594. <http://www.jstor.org/stable/23747606>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Hargie, O., O'Donnell, A., & McMullan, C. (2010). Constructions of Social Exclusion Among Young People From Interface Areas of Northern Ireland. *Youth & Society*, 43(3), 873–899. <https://doi.org/10.1177/0044118x10366950>
- Indonesia, B.-S. (2022). Completion Rate by Educational Level and Province – Statistical Data. [Www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTk4MCMY/completion-rate-by-educational-level-and-province.html>
- Kristy Kelly. (2000). The Higher Education System in Vietnam. *World Education News and Reviews*.
- Linh, P. H. T., & Azar, A. S. (2019). A Comparative Study of the Inclusive Education Policy in Vietnam and Malaysia: Proposed Solutions for Sustainable Development Education in Vietnam. *Education Quarterly Reviews*, 2(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.03.86>
- Maulana, G. (2023). Eksklusi Sosial dalam Akses terhadap Pendidikan: Tinjauan dari Perspektif Keadilan. *Journal of Literacy Notes*. 1(2). <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/49>
- McMullin, J., & Ogmundson, R. L. (2005). Understanding social inequality: Intersections of class, age, gender, ethnicity and race in Canada. *Canadian Journal of Sociology*, 30(4), 549-550.
- Meyrizki, S. Y., & Pandjaitan, N. K. (2011). Representasi Sosial tentang Kota pada Komunitas Miskin di Perkotaan. *Sodality*, 5(2), 147-158.
- OECD (2019), *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*, PISA, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>
- Pasondi, M. (2024, Maret 1). Eksklusi Sosial dalam Dunia Pendidikan di Indonesia: Studi Kasus: Kesenjangan Digital dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak

-
- Jauh (PJJ). Jurnal Program Studi PGMI, 11(1), 478. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2250>
- Rosser, A. (2018). *Beyond access: Making Indonesia's education system work*. Lowy Institute for International Policy. <http://www.jstor.org/stable/resrep17553>
- Somerville, P. (2000). Social relations and social exclusion: Rethinking political economy. Routledge.
- Sulistiyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14
- Somerville L. H. (2013). Special issue on the teenage brain: Sensitivity to social evaluation. *Current directions in psychological science*, 22(2), 121-127. <https://doi.org/10.1177/0963721413476512>
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syahra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 1-34. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.149>
- Tanjung, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>
- Walsh, K., & Urbaniak, A. (2023). Social exclusion and critical transitions in later life: Trajectories, forms and mechanisms. *Journal of Aging Studies*, 65, 101137. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101137>